

DINAMIKA OPINI PUBLIK TERHADAP UU TNI DI INDONESIA: STUDI KASUS KAMPANYE ONLINE DI MEDIA X

Umami Kultsum¹, Fadila Nurul Fajri², Nazwa Auliaddina Putri³, Muhammad Bintang Prayoga⁴, Azka Aisul Mubarak⁵, Pia Khoirotun Nisa⁶
26uumkultsum@gmail.com¹, fadilaanurul83@gmail.com², bibipby4@gmail.com³,
prayogabintang189@gmail.com⁴, azkabr50@gmail.com⁵, pia.khoirotun@uinjkt.ac.id⁶
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika opini publik terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) melalui studi kasus kampanye online di platform Media X. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana digital dan data dari media sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana narasi pro dan kontra terhadap revisi UU TNI terbentuk dan tersebar di ranah digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu utama yang memicu perdebatan publik adalah kekhawatiran terhadap kembalinya dwifungsi TNI, kurangnya transparansi dalam proses legislasi, dan potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil. Sentimen negatif mendominasi percakapan di media sosial, dengan tagar seperti #TolakRUUTNI dan #IndonesiaGelap menjadi simbol penolakan publik. Sebaliknya, media online cenderung menampilkan pemberitaan yang lebih positif terhadap revisi UU TNI. Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat memobilisasi partisipasi politik dalam konteks kebijakan pertahanan nasional.

Kata Kunci: UU TNI, Opini Publik, Kampanye Digital.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of public opinion regarding the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (UU TNI) through a case study of an online campaign on the Media X platform. Employing digital discourse analysis and social media data, the research investigates how pro and contra narratives concerning the UU TNI revision are formed and disseminated in the digital sphere. The analysis reveals that key issues triggering public debate include concerns over the potential return of the military's dual function, lack of transparency in the legislative process, and threats to the principle of civilian supremacy. Negative sentiment dominates social media discussions, with hashtags such as #TolakRUUTNI and #IndonesiaGelap symbolizing public rejection. In contrast, online media outlets tend to present more favorable coverage of the UU TNI revision. These findings suggest that social media plays a crucial role in shaping public opinion and can mobilize political participation in the context of national defense policy.

Keywords: UU TNI, Public Opinion, Digital Campaign.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem Civil Law, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, hukum tertulis menjadi rujukan utama untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Salah satu bagian hukum strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang mengatur peran, fungsi, dan wewenang militer dalam negara demokrasi. Sebagai institusi yang memiliki hak atas penggunaan kekuatan bersenjata, peraturan TNI dalam hukum nasional menjadi sorotan karena untuk memastikan keseimbangan antara pertahanan negara dan prinsip-prinsip demokrasi sipil.

Pada 25 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan revisi UU TNI. Sejak proses pengesahannya banyak menuai kontroversi dan kritik dari berbagai elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat sipil, kritik

tersebut mengenai adanya aspek substantif maupun prosedural mulai dari minimnya transparansi dalam pembahasan, terbatasnya keterlibatan publik, hingga isi RUU tersebut yang dianggap berpotensi memperbesar peran militer pada ranah sipil. Karena UU TNI merupakan bagian dari hukum yang tidak hanya mengatur institusi TNI itu sendiri, tetapi juga terhadap dinamika hubungan sipil-militer dan proses demokratisasi nasional.

Dengan adanya perubahan atau implementasi atas UU inilah yang menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan kontrol atas kekuatan militer. Setelah disahkan, gelombang kritik pro dan kontra serta demonstrasi terjadi dimana-mana dan semakin meluas, ini menunjukkan karena adanya kekhawatiran terkait di sahkan UU TNI tersebut, yang dimana beberapa ketentuan dalam UU TNI dapat membuka kembali ruang bagi militerisme dan pola-pola otoritarianisme yang mengingatkan pada praktik Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.

Dalam konteks demokrasi pasca reformasi, hubungan antara sipil dan militer menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Reformasi 1998 telah berhasil untuk membatasi peran militer di luar fungsi pertahanan negara, termasuk berhasil memisahkan TNI dan POLRI serta menghapus peran politik formal militer. Oleh karena itu, setiap adanya perubahan regulasi yang mengatur posisi TNI selalu menjadi sorotan dan permasalahan serius, baik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.

Bersamaan dengan perkembangan teknologi Informasi, khususnya melalui media sosial, telah mengubah lanskap komunikasi politik secara fundamental (Casero-Ripollés, 2021). Fenomena ini tidak hanya menciptakan ruang baru bagi interaksi politik, tetapi juga merintis paradigma baru dalam pembentukan opini publik. Dinamika opini publik terhadap isu-isu strategis nasional salah satunya seperti revisi UU TNI yang tidak hanya berkembang di ruang-ruang diskusi formal melainkan juga di ranah digital

Dalam era digital saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu strategis nasional. Di Indonesia platform Twitter menjadi salah satu platform digital yang paling aktif digunakan dalam kampanye isu-isu politik, termasuk kampanye mengenai revisi UU TNI. dengan adanya fitur-fitur seperti hastag, retweet, thread, dan reply, yang membantu memperluas penyebaran informasi secara cepat, dengan adanya fitur-fitur tersebut telah mengubah pola komunikasi politik masyarakat Indonesia menjadi lebih horizontal, partisipatif, dan berbasis jaringan. Platform Twitter memungkinkan konten viral mendominasi percakapan publik, membentuk agenda setting digital, dan bahkan bisa mempengaruhi arus media utama.

Melalui media sosial, berbagai aktor, baik individu, aktivis, hingga influencer, menggunakan strategi kampanye digital untuk membentuk persepsi kolektif tentang revisi UU TNI. Dinamika opini publik di Twitter terkait UU TNI tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas interaksi antara faktor sosial, politik, dan teknologi. Bukan hanya itu saja, tetapi kesadaran masyarakat terhadap pengawasan kekuasaan negara juga semakin penting dan semakin menguat sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pasca-reformasi.

Media sosial, khususnya Twitter, membuka ruang partisipatif yang dimana masyarakat diberi kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka dan langsung.

Sebaliknya, dinamika tersebut seringkali dipengaruhi oleh strategi komunikasi politik yang terstruktur, di mana kepentingan politik tertentu berusaha membentuk, mengarahkan, bahkan mengendalikan opini kolektif. Dalam konteks perdebatan mengenai UU TNI, realitas ini menunjukkan pentingnya kajian kritis terhadap bagaimana media sosial digunakan sebagai alat mobilisasi opini dan bagaimana hal itu berdampak terhadap relasi sipil-militer dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi arena pertarungan wacana, di mana berbagai pihak berkompetisi untuk mendominasi ruang publik digital. Kampanye online terhadap revisi UU TNI menggunakan berbagai strateg komunikasi digital, melalui berbagai hastag seperti #TolakRUUTNI #SaveDemokrasi dan lainnya, selain itu juga banyak dilakukan melalui narasi emosional, penggunaan meme, visualisasi data, hingga mobilisasi melalui selebritas media sosial dan buzzer politik. Kampanye ini tidak hanya menyuarakan kritik terhadap pasal-pasal yang bermasalah, tetapi juga menyerukan aksi kolektif seperti demonstrasi dan penandatanganan petisi online

Namun, pembentukan opini publik di media sosial tidak lepas dari tantangan serius. Penyebaran disinformasi, manipulasi narasi oleh akun-akun anonim, dan dominasi framing oleh kelompok tertentu berpotensi mengaburkan fakta dan memperkeruh diskursus publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembentukan opini publik di dunia maya tidak selalu berlangsung secara organik, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategi komunikasi digital yang terstruktur. Di sisi lain, karakteristik algoritmik Twitter berpotensi menciptakan "echo chambers" atau ruang gema, di mana pengguna hanya terekspos pada informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka, memperdalam polarisasi opini terhadap isu revisi UU TNI yang menyebabkan memperkeras perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Isu revisi UU TNI sangat sensitif karena menyentuh aspek fundamental hubungan sipil-militer di Indonesia. Setiap perubahan terhadap posisi dan peran militer membawa implikasi luas, tidak hanya terhadap institusi TNI, tetapi juga terhadap konsolidasi demokrasi dan prinsip kontrol sipil atas kekuatan bersenjata. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa opini publik di era digital bukanlah hasil dari proses deliberatif rasional semata, melainkan juga produk dari interaksi kompleks antara teknologi, politik, dan budaya komunikasi digital.

Dinamika ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi ambivalen: di satu sisi memperkuat partisipasi demokratis, di sisi lain memperbesar risiko polarisasi, fragmentasi sosial, dan manipulasi opini publik. Studi ini tidak hanya relevan untuk memahami praktik komunikasi politik digital, tetapi juga untuk melihat bagaimana partisipasi publik dalam era teknologi informasi berkontribusi terhadap arah demokrasi dan hubungan sipil-militer di Indonesia. Dengan menganalisis aktor kunci, narasi dominan, pola interaksi digital, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami tantangan baru demokrasi Indonesia di era konektivitas global.

Pemahaman terhadap dinamika ini juga menjadi krusial di tengah meningkatnya fenomena politik berbasis media sosial, di mana batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Keterlibatan masyarakat dalam perdebatan daring mengenai isu-isu strategis seperti UU TNI menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai arena pertarungan ideologi dan kepentingan politik. Oleh sebab itu, studi ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana platform seperti Media X dapat memperkuat atau justru melemahkan kualitas deliberasi publik, serta mengkaji bagaimana teknologi algoritmik mempengaruhi paparan informasi dan pembentukan opini generasi muda Indonesia.

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami karakteristik, pola penyebaran, serta dampak dari dinamika opini publik terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai UU TNI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian komunikasi politik digital, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang di era media sosial.

METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang berfokus pada bagaimana individu atau kelompok membentuk pemahaman mereka tentang realitas sosial berdasarkan pengalaman, interaksi, dan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari dunia sekitar, salah satunya informasi yang diperoleh dari media sosial.

Dalam paradigma ini, media sosial khususnya X, dipahami sebagai ruang diskusi di mana aktor-aktor sosial membangun, memperdebatkan, dan memodifikasi makna mengenai UU TNI. Paradigma ini sesuai dengan pendekatan yang menempatkan opini publik sebagai hasil dari proses diskursif dan intersubjektif.

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini sangat relevan dengan paradigma konstruktivis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana pengguna media Twitter dan dalam membentuk persepsi mereka terhadap konflik UU TNI di Indonesia. Creswell (2014) menjelaskan bahwa dalam paradigma konstruktivis, peneliti berupaya untuk memahami persepsi yang dibangun oleh individu terhadap dunia sekitar mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana pengguna media Twitter dan Instagram menilai validitas informasi yang mereka terima khususnya terkait cara mereka membedakan antara berita yang valid dan disinformasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna-makna sosial secara mendalam berdasarkan sudut pandang partisipan. Data diperoleh melalui sumber-sumber informasi yang relevan dan kredibel strategi ini digunakan untuk memperkuat validitas data dan menjamin bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang sedang dikaji..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara untuk mengetahui seperti apa persepsi dan mayoritas / minoritas suara publik mengenai kasus kampanye online UU TNI yang terjadi di media X. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, di mana peneliti berusaha untuk menggali pemahaman mendalam dan interpretasi yang dibentuk oleh pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, termasuk media sosial.

Menurut Denzin dan Lincoln, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara alami dalam konteks sosial yang kompleks, tanpa memisahkan variabel-variabel yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling sesuai untuk memahami bagaimana kampanye online mengenai UU TNI memengaruhi wacana publik di ruang media digital.

Lexy J. Moleong (2017), juga mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif dan pandangan individu yang terlibat. Pendekatan ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan karena tujuannya ingin menangkap perspektif subjektif mahasiswa terkait validitas bias, dan peran Media Sosial Twitter dan Instagram dalam membentuk persepsi mereka mengenai isu UU Cipta Kerja di Indonesia.

3. Metode Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengguna media sosial Twitter, khususnya generasi Z yang aktif dalam menggunakan Twitter dan memiliki ketertarikan atau keterlibatan dalam diskusi mengenai isu-isu nasional, termasuk topik tentang Undang-Undang Tentara

Nasional Indonesia (UU TNI). Generasi Z dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi digital dan memiliki karakteristik sebagai digital native, sehingga pola mereka dalam mengakses, membentuk, dan menyebarkan opini sangat bergantung pada platform media sosial, termasuk Twitter. Peneliti akan memilih mahasiswa sebagai representasi generasi Z dari berbagai latar belakang studi untuk mendapatkan beragam perspektif terkait persepsi mereka terhadap kampanye online mengenai UU TNI di Twitter.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dinamika penyebaran dan pembentukan opini publik di Twitter terkait isu Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Fokus utama dari objek ini meliputi bagaimana persepsi generasi Z terbentuk terhadap isu UU TNI di Twitter, bagaimana mereka memproses dan memvalidasi informasi yang diterima, serta bagaimana keterlibatan dalam kampanye online mempengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Twitter sebagai platform dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan media lain, khususnya dalam konteks advokasi dan perdebatan kebijakan yang melibatkan institusi negara seperti TNI.

3) Sumber Penelitian

a). Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yaitu generasi Z yang aktif menggunakan media sosial Twitter dan terlibat dalam diskusi mengenai isu UU TNI. Data ini mencakup informasi tentang persepsi, pengalaman, dan pemahaman pengguna terkait dinamika opini publik di Twitter. Dalam proses wawancara, peneliti akan mengeksplorasi berbagai aspek, seperti bagaimana cara pengguna menerima dan memproses informasi tentang UU TNI, bagaimana mereka menilai validitas suatu narasi, serta bagaimana mereka melihat peran Twitter dalam memfasilitasi advokasi, perdebatan, dan pembentukan opini terhadap isu tersebut.

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara, observasi, maupun angket. Data primer ini memberikan gambaran yang lebih mendalam dan autentik mengenai objek yang diteliti karena diperoleh langsung dari partisipan yang mengalami atau terlibat dalam fenomena tersebut. Selain itu, Bungin juga menekankan bahwa data primer bersifat empiris, yakni diperoleh secara langsung dari lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian.

b). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti literatur ilmiah, jurnal akademik, buku, artikel berita, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen atau arsip digital yang relevan dengan isu opini publik tentang UU TNI dan penggunaan media sosial, khususnya Twitter. Data sekunder digunakan untuk memperkaya landasan teori, memahami konteks lebih luas terkait hubungan antara media sosial dan pembentukan opini publik, serta untuk membandingkan dan mengkaji hasil temuan dari data primer yang diperoleh melalui wawancara.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi digital (netnografi), dan studi dokumentasi. Dengan mengkombinasikan ketiga teknik tersebut, penelitian ini dapat menggali data

secara holistik dan mendalam.

a) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria purposive. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap memungkinkan fleksibilitas dalam menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi informan mengenai kampanye online terkait UU TNI di media sosial, khususnya Twitter. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b) Observasi

Observasi digital dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi dan konten yang muncul di media sosial, termasuk penggunaan tagar seperti #TolakRUUTNI #SupremasiSipil, komentar pengguna, bentuk visual kampanye, serta pola penyebaran.

Menurut B  r   dkk. (2014), observasi digital (atau observasi daring) dapat dilakukan tanpa interaksi langsung dengan partisipan, di mana peneliti mengamati kejadian yang terjadi secara online tanpa intervensi, sehingga data yang diperoleh bersifat natural dan autentik. Observasi digital ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi daring reaktif, di mana partisipan mengetahui bahwa mereka sedang diamati, dan observasi daring non-reaktif, di mana partisipan tidak menyadari pengamatan tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung data primer dan observasi dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi artikel berita, jurnal ilmiah, laporan organisasi, dokumen resmi pemerintah, unggahan media sosial yang terdokumentasi, serta literatur yang membahas opini publik dan komunikasi digital. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat, memperkaya interpretasi data lapangan, serta menguatkan triangulasi data dalam proses analisis.

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna, persepsi, dan konstruksi publik melalui interaksi di media sosial, khususnya Twitter. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif dalam paradigma konstruktivis, dengan mengorganisasi data dari wawancara mendalam, observasi digital, dan dokumentasi media sosial.

Fokus analisis terletak pada proses pembentukan persepsi serta dinamika kampanye online sebagai bentuk partisipasi politik digital. Penelitian ini mengungkap bagaimana mahasiswa membentuk pandangan terhadap UU TNI, memilah informasi valid dan disinformasi, serta memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskusi alternatif di luar partisipasi formal dalam proses legislasi. Hasilnya diharapkan memberi gambaran tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik dan wacana politik di era digital.

6) Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi digital (netnografi), dan dokumentasi media sosial seperti Twitter dan Instagram. Tujuannya untuk menguji kredibilitas, dan pastinya dilakukan juga member check dengan meminta konfirmasi dari informan untuk memvalidasi interpretasi peneliti sesuai dengan penemuan data yang dibutuhkan.

Kredibilitas diperkuat dengan pengamatan yang berjangka panjang dan penggunaan bahan referensi yang relevan. Transferabilitas dijaga dengan penyajian deskripsi kontekstual secara rinci mengenai latar belakang subjek dan lingkungan sosial. Sedangkan

dependabilitas dan konfirmabilitas dicapai melalui pencatatan proses penelitian yang sistematis dan transparan, sehingga temuan dapat ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, verifikasi data menjadi landasan penting dalam menjaga keabsahan hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan mencerminkan realitas yang dikaji.

7) Jadwal Penelitian

- a) Studi Literatur dan Pengumpulan Data : 23 Maret - 08 April 2025
- b) Wawancara dan Temuan Data : 08 April - 28 April 2025
- c) Penyusunan Makalah : 10 April - 29 April 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk kampanye online mengenai Undang-Undang TNI yang muncul di platform X

Berdasarkan temuan data yang kami peroleh melalui wawancara dengan sejumlah narasumber, mengenai Bentuk kampanye online Undang-Undang TNI yang ada pada platform X menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, ditemukan bahwa kampanye online mengenai revisi Undang-Undang TNI di platform X berlangsung secara intensif dengan berbagai bentuk penyampaian.

Seluruh narasumber menyatakan mengikuti kampanye ini, meskipun dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Misalnya, Fitra mengungkapkan keterlibatan mendalamnya dalam mengikuti isu ini, Bayn mengikuti beberapa proses kampanye, sementara Lisa mengakui terdorong untuk lebih aktif karena melihat kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye mengenai RUU TNI berhasil menciptakan atensi publik yang cukup luas.

Terkait bentuk kampanye, ditemukan bahwa penyampaian pesan dilakukan melalui berbagai format digital seperti thread panjang yang membahas detail pasal-pasal revisi, infografis yang merangkum substansi isu, serta reels atau video pendek yang menyoroti aspek kontroversial dari RUU tersebut. Penyajian informasi tidak hanya disampaikan dalam bentuk teks, tetapi juga visual dan audiovisual untuk menjangkau khalayak dengan preferensi media yang berbeda-beda. Selain itu, perluasan kampanye ke platform lain dengan menampilkan opini tokoh masyarakat dan akademisi juga menunjukkan adanya strategi integrasi lintas media untuk memperluas jangkauan audiens.

Dalam hal karakteristiknya, mayoritas narasumber menilai bahwa kampanye ini bersifat informatif, meskipun terdapat pula elemen provokatif. Dinamika ini memperlihatkan bahwa kampanye tidak hanya mengandalkan logika argumentatif, tetapi juga membangun ikatan emosional dengan audiens. Strategi lain yang digunakan untuk menarik perhatian publik adalah penggunaan hashtag seperti #TolakRUUTNI, #ReformasiTNI, dan #KembalikanTNIkeBarak.

Jika dikaitkan dengan teori Spiral of Silence yang dikembangkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974), fenomena ini memperlihatkan bagaimana persepsi tentang opini mayoritas terbentuk dan diperkuat di ruang digital. Spiral of Silence menjelaskan bahwa individu cenderung menyuarakan opini mereka ketika mereka merasa pandangan mereka didukung oleh mayoritas, dan sebaliknya, akan diam jika merasa opini mereka minoritas dan berpotensi mendapatkan sanksi sosial. Dalam konteks kampanye revisi UU TNI di platform X, penyebaran masif informasi yang cenderung kritis terhadap revisi RUU tersebut, penggunaan hashtag yang konsisten, serta atmosfer emosional yang dibangun, menciptakan persepsi kuat bahwa penolakan terhadap RUU ini merupakan opini dominan.

Hal ini membuat individu yang setuju dengan narasi kampanye merasa lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya, sedangkan mereka yang mendukung revisi atau bersikap netral cenderung menahan diri dari mengekspresikan pandangan mereka di ruang

publik daring karena mungkin beberapa merasa takut diserang oleh pihak-pihak yang menolak, makanya cenderung memaling bungkam. Dengan demikian, kampanye online ini bukan hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga memperkuat mekanisme Spiral of Silence dalam membentuk konsensus sosial mengenai isu tersebut.

2. Reaksi netizen terhadap kampanye Undang-Undang TNI, serta seperti apa dinamika opini publik yang terbentuk

Dinamika ini dapat dipahami dengan merujuk pada Teori spiral of silence, yaitu Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mengamati opini mayoritas di ruang publik, jika pandangan mereka berbeda dari mayoritas, mereka akan cenderung diam karena takut diisolasi atau mendapatkan sanksi sosial. Temuan mengenai reaksi netizen terhadap kampanye Undang-Undang TNI di platform X memperlihatkan dinamika opini publik yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar teori Spiral of Silence.

Dalam konteks temuan ini, sebagian besar netizen menunjukkan penolakan terhadap revisi UU TNI. Lisa mencatat adanya solidaritas emosional di antara warganet yang "merasa senasib dan sama-sama marah," yang berarti opini penolakan membentuk kesan dominan di ruang publik digital. Menurut Spiral of Silence, ketika satu opini terlihat lebih kuat, individu yang mendukung opini tersebut akan semakin vokal, sedangkan mereka yang tidak sejalan mungkin akan memilih untuk diam atau berbicara dengan lebih hati-hati.

Pernyataan Fitra bahwa "semua yang memiliki kesadaran berhak untuk bersuara" menunjukkan bahwa pada tahap awal, kampanye ini memberi ruang kepada banyak suara yang berani tampil ke lapangan. Ini konsisten teori Spiral of Silence di mana opini yang dianggap populer mendorong banyak orang untuk bersuara.

Sebaliknya, kehadiran buzzer yang membawa narasi tandingan, mewakili upaya untuk membalik persepsi dominasi opini. Para buzzer ini bertugas membentuk opini pro-pemerintah agar netizen yang mungkin setuju dengan revisi UU TNI tidak merasa sendirian atau takut untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, karena narasi tandingan ini tampak tidak berhasil mendominasi perbincangan (sebagaimana terlihat dari dominasi suara penolakan), maka menurut teori Spiral of Silence, individu yang mendukung revisi UU kemungkinan besar mengalami tekanan sosial untuk diam atau mengurangi intensitas menyuarakan opininya.

Selain itu, fakta bahwa perdebatan tetap hidup dengan banyak argumen pro dan kontra, menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya menghasilkan konsensus instan, tetapi menjadi arena pertarungan opini. Meski demikian, keberanian untuk berbicara tetap sangat dipengaruhi oleh sudut pandang mengenai opini mana yang lebih "menang" atau lebih diterima di mata publik, yang merupakan inti dari mekanisme spiral keheningan.

Pandangan netizen terhadap kampanye Undang-Undang TNI, serta seperti apa dinamika opini publik yang terbentuk berdasarkan hasil observasi opini publik di media "X"

Untuk mendapatkan data dari media sosial, penulis tidak hanya melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Namun juga, melakukan observasi pada opini publik di Media Twitter "X". Dengan menganalisis opini yang dikemukakan masyarakat terhadap Undang-Undang TNI, melalui cuitan-cuitan yang mereka unggah dan bagikan di platform X.

Tabel 1. Hasil Observasi Cuitan-Cuitan Mayoritas Opini Publik yang Menolak UU TNI di Media "X"

Penulis melakukan observasi yang menyajikan hasil terhadap cuitan-cuitan yang beredar di platform media sosial Twitter 'X', yang mayoritas menggambarkan opini publik

yang menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Data ini memberikan gambaran awal mengenai sentimen masyarakat dan kecenderungan wacana publik di ruang digital terkait isu tersebut. Berikut hasil observasi penulis:

Akun Twitter	Cuitan
@rockstarstae	Temen temen online harus tetap berisik. Harus tetap kawal teman kita yang aksi hari ini. Jangan sampai turun tagarnya ya, terus bersama kawan kawan yang aksi. PANJANG UMUR PERJUANGAN #TolakRUUTNI #TolakDwifungsiAbri #TolaRevisiUUTNI
@amnestyindo	Kita harus #TolakRUUTNI karena: DPR dan pemerintah nggak dengerin suara warga saat bahas RUU Iinya bisa bikin militer makin berkuasa, tapi perbaikan tanggungjawab militer belum keliatan hilalnya. Udah pegang senjata, masa pegang kuasa juga? Simak #AmnestyMenjawab
@24hoursofmiaw	TURUT BERDUKA CITA ATAS MATINYA REFORMASI! #CabutRUUTNI, #TolakRUUTNI, #SupremasiSipil
@baymaxsad	LAWAN SAMPAI MENANG, HIDUP RAKYAT MELAWAN! #TolakRUUTNI #PeringatanDarurat #TolakDwifungsiABRI
@Naandaa27	Salah satu alasan penolakan UU TNI adalah Masyarakat tdk ingin lagi TNI terlibat dlm urusan politik atau pemerintahan sipil tapi fokus pd tugas utamanya, yaitu mempertahankan negara. Tapi DPR malah abai & budeg! #CabutUUTNI #TolakRUUKejaksanaan Gempa Cerai, KAWAL SAMPAI MENANG!
@DazzZulia	Militer professional seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan ambil peran dalam kehidupan sipil! Tolak semua upaya yang membawa kita ke era otoritarian #TolakUUTNI #TolakRUUPolri #TolakDwifungsiABRI

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Media X (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, penulis berpendapat bahwa opini mayoritas publik di platform “X” adalah penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Ini tercermin dari cuitan akun-akun seperti @rockstarstae dan @amnestyindo secara terang-terangan menyuarakan keberatan mereka dengan didukung menggunakan tagar seperti #TolakRUUTNI #TolakDwifungsiAbri #TolakRevisiUUTNI.

Berdasarkan Teori Spiral of Silence, yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann, menyatakan bahwa individu cenderung enggan mengungkapkan opini jika mereka merasa opini tersebut berada dalam posisi minoritas atau bertentangan dengan opini mayoritas. Rasa takut akan isolasi sosial menjadi pendorong utama seseorang untuk diam. Hal ini berkaitan bahwa keberadaan opini dominan ini menciptakan atmosfer, yang mana individu yang tidak sependapat atau yang mendukung pengesahan UU TNI, kemungkinan akan mengalami tekanan sosial.

Akibatnya, mereka cenderung memilih untuk tidak menyuarakan secara terang-terangan atau terbuka di media sosial. Ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan perbedaan persepsi publik, seolah hanya ada satu penolakan, padahal bisa saja ada opini

penolakan yang memilih diam karena takut mendapatkan penolakan dari kelompok dominan. Dominasi narasi penolakan di media sosial memperkuat efek Spiral of Silence dimana opini yang berlawanan semakin tenggelam dalam keheningan digital. Ini menunjukkan bahwa ruang digital seperti “X” dapat menjadi tempat pembentukan opini publik.

Meskipun dominasi opini publik di media sosial Twitter “X”, cenderung menunjukkan penolakan terhadap pengesahan UU TNI, namun terdapat sejumlah cuitan dari pengguna yang menunjukkan dukungan terhadap regulasi tersebut. Berikut adalah cuitan- cuitan yang berasal dari kelompok minoritas opini.

Tabel 2. Hasil Observasi Cuitan-Cuitan Minoritas Opini Publik yang Mendukung UU TNI di Media “X”

Sebagaimana teori Spiral of Silence dimana suara yang berbeda dari mayoritas cenderung jarang terlihat secara terbuka atau terang-terangan. Tabel berikut menampilkan hasil observasi penulis terhadap beberapa akun yang ditemukan menyuarakan dukungan terhadap UU TNI di tengah dominasi opini penolakan.

Akun Twitter	Cuitan
@Kamarudin7S	Tetap dukung RUU TNI demi kamanan dan kedaulatan negara . #Fakta #RevisiUUTNI #DukungRUUTNI
@0xIndoPride	RUU TNI tidak mengembalikan dwi fungsi ABRI. Mari bersama dukung TNI yang kuat dan profesional! #PertahananKuat #DukungRUUTNI #TNIProfesional #IndonesiaTerang
@darwissminsheng	Jangan tergoda ikut kerusuhan. Tunjukkan kedewasaan dan kedamaian.
@anvie	Di Toktik narasinya lebih absurd lagi : “yang gak dukung UU TNI berarti pendukung koruptor”

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Media X (2025)

Melalui observasi penulis, cuitan-cuitan yang ditampilkan merupakan representasi dari opini publik minoritas yang mendukung pengesahan UU TNI. Penulis berpendapat bahwa dalam konteks media sosial seperti Twitter “X”, opini ini terlihat tidak dominan dibandingkan opini penolakan yang muncul melalui berbagai tagar seperti #TolakRUUTNI.

Cuitan dari akun @Kamarudin7S dan @0xIndoPride memperlihatkan opini yang mendukung UU TNI, sebagai bentuk nasionalisme dan profesionalisme militer. Meskipun mereka minoritas, mereka tetap menyuarakan dukungan menggunakan tagar seperti #DukungRUUTNI #TNIProfesional #IndonesiaTerang. Jika kelompok pendukung UU TNI adalah minoritas, maka mereka menghadapi tekanan sosial sebagaimana yang dijelaskan teori Spiral Of Silence. Pada kasus ini, mereka tidak sepenuhnya diam, melainkan tetap bersuara di ruang publik digital, meskipun tidak secara terang-terangan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang untuk minoritas melawan spiral keheningan yang membentuk kelompok digital terhadap opini dominan.

Menurut Noelle-Neumann (1984), individu cenderung menghindari pembahasan topik-topik yang tidak memperoleh dukungan dari mayoritas, karena adanya kecemasan terhadap isolasi sosial. Teori ini menekankan bahwa seseorang akan lebih memilih untuk menyembunyikan pendapat pribadinya apabila pandangan tersebut bertentangan dengan opini dominan di masyarakat. Selain itu, konteks sosial-politik turut mempengaruhi kecenderungan individu dalam menyuarakan pandangan. Dalam masyarakat yang

demokratis dan menjamin kebebasan berpendapat, individu lebih terdorong untuk menyampaikan opini.

Penulis mengemukakan bahwa berdasarkan observasi yang dilakukan, data terhadap penolakan UU TNI lebih dominan ditemukan dibandingkan dukungan terhadap UU TNI yang mana berarti opini tersebut minoritas. Opini yang minoritas juga cenderung tidak secara terang-terangan atau terbuka dalam memberikan opini, menurut analisis penulis bahwa ini berkaitan dengan teori Spiral Of Silence bahwa terdapat kecemasan terhadap isolasi sosial.

Berdasarkan Penelitian oleh Pia & Alfina (2022) memperlihatkan bagaimana dominasi opini dalam ruang media sosial khususnya pada akun Instagram milik Oki Setiana Dewi ini menciptakan situasi di mana opini alternatif jarang muncul. Hal ini sejalan dengan konsep Spiral of Silence dari Noelle-Neumann, di mana individu akan memilih diam ketika merasa pendapatnya bertentangan dengan opini mayoritas di ruang publik.

Selain itu, fakta bahwa perdebatan tetap hidup dengan banyak argumen pro dan kontra, menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya menghasilkan konsensus instan, tetapi menjadi arena pertarungan opini. Meski demikian, keberanian untuk berbicara tetap sangat dipengaruhi oleh sudut pandang mengenai opini mana yang lebih "menang" atau lebih diterima di mata publik, yang merupakan inti dari mekanisme spiral keheningan.

Dengan demikian, berdasarkan teori Spiral of Silence, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus kampanye UU TNI, opini publik di ruang digital cenderung membentuk spiral yang memperkuat suara penolakan, sambil secara tidak langsung membungkam atau melemahkan suara-suara yang mendukung revisi UU, melalui dinamika dominasi persepsi opini mayoritas di platform X.

Peran media sosial dalam membentuk fenomena spiral of silence dan keterbukaan opini publik terhadap Undang-Undang TNI

Dari hasil wawancara, tampak jelas bahwa media sosial khususnya aplikasi X memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk ruang diskusi publik tentang revisi UU TNI. Di satu sisi, banyak orang merasa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Tapi di sisi lain, ada rasa khawatir yang terus mengikuti, terutama terkait potensi ancaman hukum atau serangan dari pihak-pihak yang tidak setuju. Hal ini sangat berkaitan dengan teori Spiral of Silence yang menjelaskan bahwa orang cenderung diam ketika mereka merasa pendapatnya berbeda dari mayoritas, atau takut mendapat sanksi sosial.

Fitra mengatakan bahwa dia merasa bebas berbicara tapi tidak merasa aman. Ini mencerminkan bahwa orang bisa berpendapat, tapi mereka tetap takut akan risiko, seperti jeratan UU ITE. Namun, tak semua narasumber merasakan hal yang sama. Narasumber lain justru melihat media sosial, terutama X, sebagai ruang yang cukup bebas. Bagi mereka, media sosial bisa menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi. Ini menunjukkan bahwa spiral of silence tidak selalu bekerja dalam satu arah dalam beberapa kasus, opini minoritas bisa menjadi mayoritas karena kekuatan viralitas di X.

Meski begitu, dinamika ini tidak hitam-putih. Lisa sendiri menyebut bahwa masih ada orang yang ragu menyuarakan opini pribadinya, meskipun opini itu sebenarnya sejalan dengan suara mayoritas. Artinya, rasa takut atau tidak nyaman bukan hanya muncul karena berbeda pendapat, tapi juga karena ada tekanan sosial dan politik yang membuat orang berpikir dua kali sebelum berbicara. Jika dikaitkan dengan teori Spiral Of Silence bahwa media dilihat sebagai pengaruh yang kuat pada estimasi pendapat mayoritas individu.

Di platform X, opini publik memang cepat terbentuk. Apa yang sering muncul di timeline akan dianggap sebagai suara mayoritas. Ketika satu pendapat lebih banyak disukai, di-retweet, dan dibicarakan, maka pengguna lain bisa merasa terdorong untuk mengikuti arus atau memilih diam jika merasa tidak cocok. dan situasi ini lah spiral of silence bekerja secara halus namun kuat, bukan karena ada larangan tegas, tapi karena orang merasa takut dikritik atau diserang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye online mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di media sosial, khususnya platform X, menjadi arena strategis dalam pembentukan opini publik di era digital. Dinamika kampanye berlangsung secara intensif dengan beragam bentuk penyampaian, termasuk thread edukatif, infografis, serta konten audiovisual yang bersifat informatif maupun emosional. Kampanye ini berhasil menciptakan partisipasi publik yang luas, utamanya dari kalangan generasi Z yang aktif dalam ruang digital dan memiliki sensitivitas terhadap isu-isu demokrasi dan hubungan sipil-militer.

Ditemukan bahwa opini publik didominasi oleh narasi penolakan terhadap revisi UU TNI, yang dibangun secara organik maupun terstruktur oleh berbagai aktor digital seperti aktivis, influencer, dan komunitas sipil. Meskipun demikian, terdapat kelompok minoritas yang mendukung revisi UU, namun kecenderungan “spiral of silence” membuat pandangan tersebut kurang terdengar secara signifikan dalam diskursus daring. Media sosial, dalam hal ini, berperan ganda sebagai ruang ekspresi publik sekaligus medan kontestasi opini yang dapat memperkuat maupun membatasi keberagaman suara.

Dengan demikian, studi ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital, partisipasi politik yang kritis, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa media sosial bukan hanya medium komunikasi, tetapi telah menjadi aktor aktif dalam proses demokratisasi, yang dapat memengaruhi arah kebijakan publik dan relasi sipil-militer di Indonesia. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian komunikasi politik digital dan memperkaya pemahaman tentang konstruksi opini publik dalam masyarakat terhubung (networked society).

Saran

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks dinamika opini publik di media sosial. Akademisi dapat menjadikan kampanye online terkait UU TNI sebagai studi kasus untuk mengkaji peran media digital dalam proses demokrasi, partisipasi masyarakat, serta pembentukan wacana publik. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk memperluas perspektif dengan metode kuantitatif atau pendekatan multidisipliner, guna memperkaya pemahaman mengenai perilaku komunikasi politik generasi muda di era digital.

b. Praktisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi komunikasi, termasuk pengelola media, konsultan politik, dan pembuat kebijakan, dalam memahami pola keterlibatan publik di media sosial. Praktisi perlu memperhatikan bahwa media sosial bukan sekadar ruang promosi atau sosialisasi kebijakan, tetapi juga arena terbuka bagi kritik dan dialog publik. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif sangat dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu publik yang sensitif seperti UU TNI.

DAFTAR PUSAKA

- Ahmad Redi. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.
- Febrianto, T. B. H. (2019). Peran Civil Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 236.
- Mietzner, M. (2018). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral restrictions, religious intolerance, and presidential illiberalism. *Democratization*, 25(8), 1445–1463.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia* (Revised ed). Equinox Publishing.
- Honna, J. (2019). Security sector reform in Indonesia: The interplay between domestic politics and global norms. *Contemporary Southeast Asia*, 41(1), 1–27.
- Casero-Ripollés, A (2021). Digital Journalism: Rethinking Communications Politics in a Digital Environment. *Communication & Society*, 34(1), 5-18.
- McCombs, Maxwell. *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Cambridge: Polity Press, 2004, hlm. 1–20.
- Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
- Gunawan, Andi, *Opini Publik, Media Sosial, dan Politik Indonesia: Sebuah Refleksi Teoritis*, *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia* Vol. 5, No. 2 (2021): 112–126
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.
- Lim, Merlyna, *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*, *Critical Asian Studies* Vol. 52, No. 1 (2020): 1–17.
- Papacharissi, Zizi, *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*, Cambridge: Polity Press, 2010, hlm. 23–41
- Castells, Manuel, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, Cambridge: Polity Press, 2012, hlm. 54–73.
- Effendi, S. Y. T. (2023). *The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Post-Conflict Peacebuilding: A Civil–Military Cooperation (CIMIC) Perspective*. *Academic and Applied Research in Military and Public Management Science*
- J.W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Sage Inc, 2014)
- Moleong L.j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2017
- Kenamer, J. D. (1990). Self-serving biases in perceiving the 21 *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume I, Nomor 1, April 1990 opinions of others: implications for the spiral of silence, *Communication Research*, 17, h.395
- Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication*, 24 (2), h.43-51
- Sergei A. Samoilenko & Solon Simmons (2025). *The handbook of social and political conflict* (p. 141). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.zzzz
- Noelle-Neumann, E. (1993). *The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press
- Neuwirth, K. (2000). Testing The Spiral Of Silence Model: TheCaseof Mexico.*International Journal of public opinion research*,12(2),138–159
- Elisabeth Noelle-Neumann, *The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin* (Chicago: University of Chicago Press, 1993).
- Yan Hendra, *Spiral of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat: Sebuah Penjelasan dan Kritik Teori* (Medan: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 113–114.
- Pia Khoirotun Nisa, Zakaria, dan Alfina Nur Istiqomah, "Ustazah Oki Setiana Dewi's Da'wah Communication Strategy on Social Media in Building Connectedness with Audience via YouTube," *Dakwah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 28, no. 2 (2024)

- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (2007), h. 153–155.
- AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, Volume 1 No. 5, Mei 2024, 231 - 242
- Denzin, Norman K, Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th ed, Thousand Oaks: Sage Publications, 2011, h. 3–6.
- Bíró, Szilvia, Florian Botzenhardt, dan Hans-Michael Ferdinand. "Online Surveys vs. Online Observations: A Comparative Analysis of Online Research Methods and their Impact on Brand Management." *Markenbrand: Die Strategiequelle – Zeitschrift für Markenstrategie* 2 (2014): 49–56.
- detikNews, Kabar Terkini soal RUU TNI Usai Kritikan Tajam soal Dwifungsi", (<https://news.detik.com/berita/d-7828455/kabar-terkini-soal-ruu-tni-usai-kritikan-tajam-soal-dwifungsi>. diakses 4 Mei 2025,)
- Anggi Trivina Palupi, "Netnographic research in understanding social media as a new public sphere", *DIGITAL THEORY, CULTURE & SOCIETY*, Vol. 2, No. 1, (2024), h. 27-36
- "Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana*, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2024.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, 2018.